

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA TAMBAROBONE KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA**

**Ali Wijaksono<sup>1)\*</sup>, Muzakir Tawil<sup>2)</sup>, Muhammad Rapi<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[wijaksono.ali03@gmail.com](mailto:wijaksono.ali03@gmail.com)

<sup>2</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[tawilmute@gmail.com](mailto:tawilmute@gmail.com)

<sup>3</sup>Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako  
[muhrapi114@gmail.com](mailto:muhrapi114@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi Lokasi penelitian ini bertepatan di Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Bintoro Tjokroamidjojo (2005:226) yang terdiri dari 3 aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketiga aspek tersebut yaitu Faktor Kepemimpinan, Faktor Komunikasi dan Faktor Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kepemimpinan pemerintah desa tambarobone baik karena telah berupaya menerapkan konsep perencanaan partisipatif. Begitupun dari aspek komunikasi, pemerintah desa tambarobone telah membangun komunikasi yang baik terhadap masyarakat desa. Sedangkan dari aspek pendidikan masih cukup baik hal ini terjadi karena tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah di desa tambarobone menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

**Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan Desa**

### **ABSTRACT**

*This research aims to understand how community participation in the preparation of the Village Development Plan in Tambarobone Village, Bungku Utara District, North Morowali Regency. The research method used is descriptive qualitative. The data collection techniques employed are observation, interviews, and documentation. The research location coincides with Tambarobone Village, Bungku Utara District, North Morowali Regency. The theory used in this research is the theory of Bintoro Tjokroamidjojo (2005:226), which consists of three aspects that influence community participation: Leadership Factor, Communication Factor, and Education Factor. The research results show that from the aspect of leadership, the Tambarobone village government is doing well because it has made efforts to implement the concept of participatory planning. Similarly, from the aspect of communication, the Tambarobone village government has established good communication with the village community. Meanwhile, from the aspect of education, it is still quite good. This is because the relatively low level of education among the people in Tambarobone village affects community participation in development planning.*

**Keyword:** *Community Participation, Planning, Village Development*

Submisi: 21-01-2025

Diterima: 24-01-2025

Dipublikasikan: 14-02-2025

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dikatakan sebagai sebuah perjalanan panjang yang bertujuan untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Perjalanan ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Tujuan akhir dari perjalanan ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Perjalanan pembangunan dimulai dengan perencanaan yang matang. Pemerintah, sebagai nakhoda kapal, merancang peta perjalanan yang detail. Peta ini berisi berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Setelah peta perjalanan disusun, pemerintah kemudian mengalokasikan anggaran untuk membiayai proyek-proyek tersebut. Anggaran ini berasal dari berbagai sumber, salah satunya seperti pajak yang kita bayarkan. Sebagai masyarakat atau penumpang dalam perjalanan pembangunan ini, kita memiliki peran yang sangat penting. Kita tidak hanya sekedar ikut dalam perjalanan, tetapi juga turut serta dalam mengarahkan kapal menuju tujuan yang kita inginkan. Berpartisipasi Aktif, Kita dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan, misalnya dengan ikut kerja bakti atau gotong royong. Memberikan Masukan, Kita juga bisa memberikan masukan dan saran kepada pemerintah terkait kebijakan pembangunan. Memilih Pemimpin, Melalui pemilihan umum, kita memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi pembangunan yang sesuai dengan harapan kita. Menjaga Lingkungan, Kita dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menghemat energi.

Pembangunan nasional adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak. Kita sebagai warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang baik, kita pasti dapat mencapai tujuan bersama. Musyawarah perencanaan pembangunan, disingkat sebagai musrembang, adalah forum diantara berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah. Regulasi ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dikepalai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di tingkat nasional, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman dan tata cara pelaksanaan Undang-Undang Desa, sehingga dapat memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Peraturan Pemerintah ini membahas tentang beberapa aspek penting dalam pengelolaan desa, seperti tata cara pemilihan kepala desa, pembentukan dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengelolaan keuangan desa, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, peraturan ini dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa.

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) dianggap krusial untuk menilai keberhasilan program. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi kunci dalam pelaksanaan Musrembang Desa. Partisipasi aktif ini tercermin dalam kehadiran masyarakat, pemberian usulan program, serta memberikan saran dan kritikan terhadap program yang diajukan dalam berbagai tahapan pelaksanaan Musrembang desa. Masyarakat desa memiliki hak yang sangat penting dalam proses pembangunan desa, yaitu hak

berpartisipasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal 13 dan Pasal 79. Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam proses pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Artinya, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam proses pembangunan desa. Dengan demikian, pemerintah desa wajib melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Perencanaan pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kemandirian desa, dan kualitas lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Tahap berikutnya adalah menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat dusun. Musrembang ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dan kebutuhan masyarakat dusun dalam rangka penyusunan RKP Desa. Setelah itu, dilakukan Musrembang Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa. Musrembang ini bertujuan untuk menyepakati rancangan RKP Desa yang telah disusun sebelumnya. Tahap terakhir adalah penetapan RKP Desa. RKP Desa yang telah disepakati dalam Musrembang Desa kemudian ditetapkan sebagai dokumen resmi yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat benar-benar terpenuhi. Partisipasi masyarakat juga dapat menghindari manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat memperjelas keinginan dan apa yang dikehendaki masyarakat, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau penafsiran yang salah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah desa untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif, serta memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pembangunan partisipatif merupakan suatu pendekatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Konsep ini telah dijabarkan dalam beberapa Permendagri, yang salah satunya Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri ini secara khusus membahas tentang pembangunan di tingkat desa. Dalam peraturan ini, pembangunan partisipatif didefinisikan sebagai suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. selanjutnya ciri-ciri pembangunan partisipatif yaitu ; keterlibatan masyarakat, Musyawarah Mufakat, Gotong Royong dan Keadilan Sosial. sedangkan prinsip-prinsip pembagunan partisipatif yaitu ; desentralisasi, Demokratisasi, Transparansi dan Akuntabilitas.

Penelitian ini mangacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2022. Adapun hasil Musrenbang Desa Tambarobone tahun 2022 adalah sebagai berikut : 1. Sektor Infrastruktur : a. Pengaspalan Jalan Tambarobone, b. Pleningan Saluran Sekunder, c. Pleningan Saluran Primer, d. Talut Jembatan, e. Penimbunan Jalan Lingkungan, f. Pembuatan Jalan Produksi Dusun 5, g. P.emasangan Lampu Jalan (Tambahan). 2. Sektor Pertanian : a. Pembuatan Jembatan Tani Uemiario, b. Jembatan Tani Kambori, c. Pengadaan Pupuk, e. Pengadaan Bibit Padi, f. Alat Panen DC 70.

3. Sektor Kesehatan : a. Rehab Berat Pustu, b. Pembuatan Gedung Posyandu, c. Pembuatan Pagar Pustu, d. Penimbunan Halaman Pustu, e. Pengadaan Mubiler Pustu. 4. Sektor Pendidikan : a. Kelanjutan Pagar Sdn Tambarobone, b. Penimbunan Halaman SDN Tambarobone, c. Pembangunan Gedung Pesraman/Pendidikan Sekolah Hindu.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun 2022 di Desa Tambarobone disusun untuk merencanakan pembangunan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan pendidikan. Meski proses perencanaan sudah melibatkan masyarakat, pelaksanaannya belum berjalan maksimal akibat beberapa kendala.

Kepemimpinan Kepala Desa Tambarobone patut diapresiasi karena telah berusaha memfasilitasi pembangunan secara konsisten. Kepala Desa juga aktif membangun komunikasi dengan masyarakat terkait rencana pembangunan desa. Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa memanfaatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) untuk menyampaikan rencana pembangunan dan menampung aspirasi warga. Undangan untuk Musrenbang disampaikan melalui Kepala Dusun dan Ketua RT, sehingga masyarakat dapat hadir dan memberikan masukan.

Meski partisipasi warga cukup baik, ada tantangan signifikan terkait pemahaman mereka terhadap perencanaan pembangunan berbasis kepentingan bersama. Sebagian besar masyarakat Desa Tambarobone menyadari pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, namun masih terbatas pada kesadaran pasif. Mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan kepada pemerintah desa tanpa mengambil tindakan nyata untuk berkontribusi secara aktif. Rendahnya pemahaman ini dapat dikaitkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang memengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya partisipasi dalam pembangunan. Akibatnya, potensi kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali utara dalam kegiatan musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambarobone sudah berjalan dimana Kepala Desa maupun pemerintah desa Tambarobone sudah melaksanakan konsep perencanaan partisipatif artinya didalam kegiatan musrenbang yang dilakukan terdapat keterlibatan masyarakat untuk ikut mengeluarkan aspirasinya. Kepemimpinan Kepala Desa Tambarobone sudah baik karena telah berupaya memfasilitasi setiap pembangunan di desa, kemudian juga kepala desa selalu melakukan komunikasi terhadap masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa Tambarobone bersama BPD telah melakukan komunikasi yang sudah baik kepada masyarakat mengenai pembangunan desa yang akan dilaksanakan, dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dan turut hadir berpartisipasi untuk ikut mengeluarkan aspirasinya di dalam kegiatan musrenbang. Pemerintah desa dalam melakukan komunikasi kepada masyarakatnya yaitu melalui undangan, melalui Kepala Dusun kemudian memerintahkan RT untuk mengundang masyarakat. Dari indikator Pendidikan, masih cukup baik karena masyarakat desa Tambarobone belum paham akan konsep perencanaan pembangunan yang berbasis pada kepentingan masyarakat. Meskipun mereka telah mengikuti kegiatan musrenbangnya dan menyalurkan aspirasinya namun masyarakat desa ini masih pada tahap menyadari bahwa demi terciptanya pembangunan desa diperlukan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, tetapi masyarakat hanya menyadari hal tersebut dan tidak mau mengambil sikap untuk bisa ikut didalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa di desa tambarobone. Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2005:226), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yang menurut sugiyono menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambaran (Sugiyono, 2013). Menurut nasir (2003:63:64) bahwa metode deskriptif adalah metode untuk mempelajari kilasan peristiwa suatu tempat, benda, ruang, system pemikiran atau kelompok orang pada saat sekarang. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan dalam latar belakang yang alamiah atau natural. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan suatu data yang mendalam dan mengandung makna yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Abe (2005:91), keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan benar. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui ide, usulan, atau aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat dalam rapat yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Karena partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting, diperlukan perencanaan yang matang agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Baik sebagai bagian dari sistem maupun sebagai individu, masyarakat memegang peran penting dalam dinamika pembangunan. Secara prinsip, pembangunan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan tidak hanya ada di tangan pemerintah, tetapi juga di tangan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat sebagai wujud semangat kebersamaan dan kesediaan untuk berkorban demi keberhasilan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan di bab-bab sebelumnya maka peneliti berusaha menjabarkan fokus penelitian secara spesifik berkaitan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa di Desa Tambarobone Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara dengan tiga indikator menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2005:226) yaitu Kepemimpinan, Komunikasi dan Pendidikan.

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini, kepala desa bersama perangkatnya serta BPD memegang peran penting. Pembangunan yang dilakukan sebaiknya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kepala desa dan jajarannya perlu memahami kondisi masyarakat dan kebutuhan yang ada. Hal yang sama berlaku untuk BPD, yang bertugas mewakili dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Jadi, kepemimpinan menjadi faktor utama yang memengaruhi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kepemimpinan pemerintah desa sangat berpengaruh dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahap musrenbang yang diadakan. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola seluruh proses musrenbang, sekaligus mengajak dan membimbing masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembangunan yang diharapkan.

Berdasarkan pernyataan dari informan bahwa kepemimpinan pemerintah desa Tambarobone terhadap masyarakat sudah cukup baik. Proses musrenbang yang dilakukan berjalan secara terstruktur, dan pemerintah desa Tambarobone sudah berupaya semaksimal mungkin melibatkan serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan atau kegiatan

musrenbang. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa musrenbang di Desa Tambarobone dilaksanakan secara bertahap, dan pada setiap tahapnya masyarakat turut berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasi terkait program-program pembangunan yang direncanakan. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa kepemimpinan pemerintah desa, termasuk kepala desa Tambarobone, terhadap masyarakatnya sudah baik. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah desa yang selalu mendorong dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan musrenbang di desa tersebut. Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Mang Juli Antara selaku masyarakat desa Tambarobone.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa aspek kepemimpinan pemerintah desa Tambarobone dan BPD terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya maksimal kepala desa dalam memperhatikan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Begitu pula dengan BPD yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mewakili aspirasi masyarakat Tambarobone saat merumuskan perencanaan pembangunan di musrenbang, baik di tingkat dusun maupun desa.

Aspek komunikasi menjadi faktor penting yang memengaruhi partisipasi masyarakat, sehingga mereka mau terlibat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program-program pembangunan. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan aktif melakukan sosialisasi serta komunikasi dengan mereka. Dengan begitu, masyarakat akan terdorong untuk terlibat dan merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan. Keterlibatan masyarakat ini penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hasil dari wawancara di atas menunjukkan komunikasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan Bungku Utara ke desa Tambarobone dalam hal musrenbang sudah cukup baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa aspek komunikasi terkait pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambarobone dan BPD dengan masyarakat setempat sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kerja sama antara pemerintah desa, BPD, para kepala dusun, serta RT/RW di Desa Tambarobone dalam menyampaikan informasi tentang kegiatan musrenbang. Upaya ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan desa yang direncanakan. Selain itu, aspek komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tambarobone dengan masyarakatnya sudah baik. Pemerintah Desa Tambarobone menyampaikan informasi terkait kegiatan musrenbang melalui pendekatan langsung kepada masyarakat di setiap dusun di desa tersebut. Melalui berbagai bentuk komunikasi yang dilakukan terkait kegiatan musrenbang di Desa Tambarobone, masyarakat dapat memahami dan ikut berpartisipasi. Pemerintah desa juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, berdialog, dan bermusyawarah bersama dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan desa. Komunikasi pembangunan sendiri mencakup berbagai upaya, cara, dan teknik untuk menyampaikan ide serta keterampilan pembangunan dari pihak pelaksana kepada masyarakat sasaran, agar mereka dapat memahami, menerima, dan berperan aktif dalam pembangunan tersebut.

Aspek pendidikan juga mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tingkat pendidikan di Desa Tambarobone sangat bervariasi, dengan jumlah masyarakat yang belum bersekolah hingga tamat SMA lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan D1 hingga S1. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tambarobone masih tergolong rendah, yang tentunya mempengaruhi pemahaman dan pengetahuan mereka tentang pembangunan desa serta partisipasi mereka dalam proses pembangunan tersebut. Hasil wawancara dengan informan bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan mereka kesulitan untuk menyampaikan argumen atau aspirasi terkait program-program pembangunan yang akan

dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembangunan desa. Sebagian masyarakat Desa Tambarobone belum memahami proses dan tujuan dari program-program pembangunan desa. Selama ini, mereka hanya tahu bahwa program-program tersebut sudah dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, dan fakta di lapangan bahwa tingkat pendidikan di setiap dusun di Desa Tambarobone sangat bervariasi, sehingga hanya sebagian masyarakat yang memahami proses dan makna dari pembangunan desa itu sendiri. Namun, dalam hal pengusulan aspirasi, justru masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawah rata-rata yang paling banyak terlibat. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih memprioritaskan persatuan di dusunnya masing-masing dari pada tingkat pendidikan individu. Sehingga, masyarakat desa belum sepenuhnya memahami konsep perencanaan pembangunan yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Meskipun masyarakat sudah mengikuti kegiatan musrenbang dan menyampaikan aspirasi, masyarakat desa masih pada tahap menyadari bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan partisipasi mereka, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Namun, mereka hanya menyadari hal tersebut tanpa berinisiatif untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tambarobone, ditemukan bahwa Kepala Desa dan perangkatnya menunjukkan perhatian besar terhadap kebutuhan masyarakat dengan turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi, dan memastikan masyarakat merasa dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga menjalankan perannya dengan baik dalam mewakili aspirasi masyarakat. Sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat berkontribusi pada terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga kepemimpinan pemerintah desa dinilai efektif dalam mewujudkan pembangunan partisipatif di Desa Tambarobone.

Aspek Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa lainnya sudah berjalan cukup baik. Proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) melibatkan berbagai pihak mulai dari kepala desa, kepala dusun, hingga RT/RW. Pendekatan langsung ke masyarakat melalui musyawarah di tingkat dusun (musdus) hingga musrenbang tingkat desa telah mendorong masyarakat untuk memberikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan. Namun, partisipasi masyarakat cenderung terbatas pada penyampaian aspirasi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka kurang percaya diri dalam berkontribusi secara aktif.

Teori Bintoro Tjokroamidjojo (2005:226) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan dipengaruhi oleh tiga indikator utama: komunikasi, pendidikan, dan kepemimpinan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa juga menjadi faktor penting, terlihat dari upaya proaktif kepala desa dan perangkatnya untuk mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan dialog. Komunikasi di Desa Tambarobone telah dilakukan dengan pendekatan yang baik melalui musyawarah berjenjang. Namun, rendahnya tingkat pendidikan menjadi kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa. Ketiga indikator ini saling terkait dan menentukan keberhasilan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, pemerintah desa disarankan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat, seperti pelatihan tentang perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan sumber daya. Sosialisasi yang lebih inklusif juga perlu dilakukan, khususnya melalui media visual dan bahasa yang mudah dipahami. Kepala desa dan perangkatnya dapat meningkatkan pendekatan langsung ke dusun-dusun dengan melibatkan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok informal sebagai agen



perubahan. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan mengadakan program pendidikan khusus untuk masyarakat desa guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap pembangunan jangka panjang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan atau kegiatan musrenbang di Desa Tambarobone, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, belum berjalan maksimal, terutama jika dilihat dari tiga aspek: kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Aspek kepemimpinan, dalam hal ini Kepala desa tambarobone dan pemerintah desa kepemimpinannya baik karena telah berupaya menerapkan konsep perencanaan partisipatif di Desa Tambarobone. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bersama masyarakat, yang melibatkan Pemerintah Desa dan BPD. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan ide atau aspirasi terkait program pembangunan desa yang akan dijalankan. Aspek komunikasi, Pemerintah Desa Tambarobone bersama BPD telah membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan. Komunikasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyampaikan undangan langsung, berkoordinasi dengan kepala dusun, RT/RW. Dengan pendekatan ini, masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tergerak untuk hadir serta menyampaikan aspirasi mereka dalam kegiatan musrenbang, sehingga merasa dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan desa. Kemudian, pada aspek Pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah di Desa Tambarobone menjadi salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan. Rendahnya pendidikan menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pembangunan desa, yang akhirnya berdampak pada minimnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan musrenbang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 2005. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Mas Agung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

## TENTANG PENULIS

### 1. IDENTITAS DIRI

Nama : Ali Wijaksono  
No. Stbk : B 101 21 199  
Tempat dan Tanggal Lahi : Tambarobone, 11 April 2003  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tambarobone  
Telp/Faks. : 0822-9779-6280  
Alamat e-mail : [wijaksono.ali03@gmail.com](mailto:wijaksono.ali03@gmail.com)



### 2. IDENTITAS ORANG TUA

#### A. Ayah

Nama : Wira Hidayat  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tambarobone

#### B. Ibu

Nama : Nur Hayati  
Pekerjaan : Petani  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Tambarobone

### 3. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
2015	SD	SDN Tambarobone
2018	SMP	SMPN 2 Bungku Utara
2021	SMA	SMAN 1 Bungku Utara
Terdaftar Sebagai Mahasiswa Universitas Tadulako Program Studi Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi di tahun 2021		